



Keynote Speech
MENTERI PERTANIAN

pada
DIES NATALIS KE XX DAN WISUDA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM DARUL ULUM

Lamongan, 9 Desember 2006

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang saya hormati:

- **Rektor dan Anggota Senat Universitas Islam Darul Ulum,**
- **Semua Civitas Akademis Universitas Islam Darul Ulum,**
- **Para undangan dan Hadirin sekalian yang saya hormati,**

Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya hari ini kita masih diberi kesempatan berkumpul bersama pada acara Dies Natalis ke XX dan Wisuda Sarjana Universitas Islam Darul Ulum. Shalawat dan salam semoga dicurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Pada kesempatan ini perkenankan saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Rektor atas undangan untuk berpartisipasi dalam Dies Natalis ke XX dan Wisuda Sarjana Universitas Islam Darul Ulum dengan memberikan orasi ilmiah. Dalam orasi ini saya mengambil tema "**Kebijakan Strategis Pembangunan Ketahanan Pangan Nasional**".

Saudara- Saudara sekalian yang saya hormati,

Pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang paling utama, karena itu pemenuhan kebutuhan pangan merupakan bagian dari hak azasi individu. Pemenuhan pangan juga sangat penting sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, mampu bersaing pada tataran global. Konsekuensi hal itu, pemerintah berperan sebagai pelopor dalam tanggung jawab penyediaan pangan yang cukup. Tetapi hal itu tidak berarti mengesampingkan peran serta masyarakat secara swakarsa. Bahkan masyarakat perlu terus didorong untuk meningkatkan peran aktif mereka dalam penyediaan pangan karena keterbatasan kemampuan anggaran pemerintah.

Pengalaman masa lalu menunjukkan, kekurangan pangan tidak hanya dapat berdampak negatif pada kondisi sosial ekonomi tetapi juga dapat menimbulkan instabilitas politik. Bahkan sebuah rezim pemerintahan yang sedang berkuasa dapat tumbang karena tidak mampu mengendalikan situasi instabilitas penyediaan pangan. Oleh sebab itu aspek stabilitas pangan senantiasa menjadi agenda prioritas pembangunan nasional.

Pada kabinet Indonesia Bersatu, operasionalisasi kebijakan stabilitas pangan dirumuskan secara integratif dengan program peningkatan ketahanan pangan. Tujuan pembangunan ketahanan pangan adalah menjamin ketersediaan dan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang baik pada tingkat nasional, daerah hingga rumahtangga. Ketahanan pangan harus diwujudkan secara merata di seluruh wilayah sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.

Mengingat pangan juga komoditas ekonomi, maka pembangunan ketahanan pangan juga dikaitkan dengan peluang pasar dan peningkatan daya saing yang dibentuk dari keunggulan spesifik lokasi, keunggulan kualitas serta efisiensi dengan penerapan teknologi inovatif. Karena produksi pangan nasional sebagian besar dilaksanakan petani dengan skala usaha kecil dan masyarakat miskin di pedesaan maka pembangunan ketahanan pangan sangat strategis untuk memperkuat ekonomi pedesaan dan mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.

Saudara- Saudara sekalian yang saya hormati,

Ketahanan pangan yang kuat dicirikan oleh kemandirian pangan yang tinggi dalam menjamin penyediaan kebutuhan pangan. Dengan demikian pengertian ketahanan pangan memberikan penekanan khusus tentang pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat dari sumber pasokan dalam negeri dan adanya kebebasan dalam penentuan dan pengelolaan sistem cadangan pangan sesuai dengan kepentingan nasional, sehingga tidak terpengaruh oleh tekanan dari negara lain.

Konsep dasar ketahanan pangan pada hakekatnya mencakup tiga aspek penting yang juga dapat dipahami sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran ketahanan pangan, yaitu : (1) Ketersediaan pangan, yang diartikan bahwa pangan tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik jumlah maupun mutunya serta aman; (2) Distribusi pangan, dimana pasokan pangan dapat menjangkau ke seluruh wilayah sehingga harga stabil dan terjangkau oleh rumahtangga dan (3) Konsumsi pangan, yaitu setiap rumahtangga dapat mengakses pangan yang cukup dan mengarahkan agar pola pemanfaatan pangan memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan gizi, keamanan, kehalalan dan efisiensi untuk mencegah pemborosan.

Dalam rangka meningkatkan kemandirian pangan, pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk memfokuskan pengembangan pangan pada lima komoditas pangan strategis, yaitu: padi, jagung, kedelai, tebu dan daging sapi. Dalam jangka pendek kelima komoditas ini diharapkan dapat mencapai tingkat swasembada sehingga ketergantungan terhadap pasar impor dan kemungkinan gangguan instabilitas penyediaannya dapat diredam.

Secara agregat nasional, pencapaian ketahanan pangan pada lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang positif yang ditunjukkan oleh beberapa indikator sebagai berikut : (a) Produksi beberapa komoditas pangan penting cenderung meningkat; (b) Pergerakan harga-harga pangan relatif stabil. Peningkatan harga pangan lebih disebabkan adanya kenaikan BBM; (c) Kualitas konsumsi masyarakat semakin membaik dan (d) Peningkatan kesejahteraan petani terutama sebelum adanya kenaikan harga BBM.

Selama periode 2000-2005 bahan pangan sumber karbohidrat strategis mengalami peningkatan, yaitu : padi 0,82 persen; jagung 4,56 persen; kacang tanah 2,71 persen, sedangkan kedelai mengalami penurunan 3,94 persen. Kecuali susu yang mengalami penurunan 5,33 persen, komoditas sumber protein hewani meningkat dengan kisaran 5,84 (daging sapi) sampai dengan 9,31 persen (daging ayam ras). Peningkatan pangan tersebut juga diikuti oleh peningkatan ketersediaan energi sebesar 0,57 persen dan protein hewani sebesar 3,98 persen.

Sejak tahun 2004, Indonesia berswasembada beras dan sampai tahun 2006 masih menunjukkan hal yang demikian. Hasil perhitungan neraca beras nasional tahun 2006 mengindikasikan adanya surplus ketersediaan. Stok awal tahun 2006 mencapai 3,8 juta ton yang sebagian besar merupakan stok yang dikuasai masyarakat. Dengan tingkat produksi yang mencapai 31,0 juta ton dan kebutuhan konsumsi sebesar 30,9 juta ton maka pada akhir tahun 2006 diperkirakan masih terdapat stok sebesar 3,9 juta ton. Situasi demikian mengindikasikan kemantapan peningkatan produksi beras di dalam negeri, sehingga impor beras untuk kebutuhan masyarakat belum diperlukan.

Stabilitas harga diukur dengan perkembangan harga rata-rata dan koefisien harga. Selama tahun 2001-2005, perkembangan harga pangan pokok dan strategis di Jawa dan Bali cenderung stabil. Demikian pula koefisien harganya juga relatif stabil, kecuali cabe merah. Bahkan harga gabah (GKP) tingkat petani juga cenderung stabil dan lebih tinggi dari harga HPP. Rata-rata harga gabah (GKP) tahun 2006 (sampai Juni 2006) mencapai Rp.2038,7 per kilogram, melebihi harga HPP yang besarnya Rp. 1730,0 per kilogram.

Dari segi konsumsi pangan masyarakat, baik kuantitas maupun kualitas pangan yang dikonsumsi menunjukkan perbaikan. Dari segi kuantitas, konsumsi energi tahun 2005 sebesar 1996 Kalori/kapita/hari lebih tinggi dibandingkan pada tahun sebelumnya. Demikian pula untuk protein pada tahun 2005 mencapai 55,3 gram/kapita/hari. Apabila mengacu pada patokan kecukupan yang direkomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) VIII (energi : 2000 Kalori dan protein : 52,0 gram/kapita/hari) maka konsumsi masyarakat sudah mendekati patokan tersebut bahkan untuk protein sudah melebihi dari yang dianjurkan. Kualitas konsumsi pangan yang

ditunjukkan oleh nilai Pola Pangan Harapan (PPH) juga meningkat, dari 66,3 pada tahun 1999 menjadi 78,2 pada tahun 2005.

Saudara- Saudara sekalian yang saya hormati,

Dalam pembangunan ketahanan pangan juga dihadapkan pada berbagai permasalahan seperti berikut. Permasalahan ketahanan pangan terkait dengan aspek ketersediaan pangan, adalah (a) terjadinya konversi lahan pertanian produktif terutama di Pulau Jawa, peningkatan proporsi petani gurem (luas garapan < 0,50 ha) dan menurunnya kinerja infrastruktur irigasi; (b) permasalahan terkait dengan adopsi teknologi yang diindikasikan adanya gangguan hama penyakit pada tanaman dan ternak, relatif besarnya proporsi tanaman tebu dengan sistem ratoon dan lain-lain serta (c) permasalahan terkait dengan implementasi kebijakan, sistem insentif dan kelembagaan yang ditunjukkan oleh tidak terealisasinya HET pupuk bersubsidi, terbatasnya fasilitas permodalan dan suku bunga KKP serta rendahnya kemampuan pengelolaan cadangan pangan.

Permasalahan yang terkait dengan aspek distribusi pangan, diantaranya adalah : (a) Terbatasnya sarana dan prasarana perhubungan untuk menjangkau daerah terpencil, (b) Keterbatasan sarana dan kelembagaan pasar; (c) Banyaknya pungutan resmi dan tidak resmi. Permasalahan ini berdampak buruk pada insentif berproduksi karena rendahnya efisiensi pemasaran dan bagian harga yang diterima petani.

Permasalahan terkait dengan aspek konsumsi pangan adalah : (a) Besarnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran dengan akses pangan yang rendah, (b) Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap diversifikasi konsumsi pangan dan gizi, (c) Masih dominannya konsumsi energi yang berasal dari beras dan (d) Rendahnya kesadaran dalam penerapan sistem sanitasi dan higienis serta keamanan pangan.

Saudara- Saudara sekalian yang saya hormati,

Ketahanan pangan terwujud apabila secara umum telah memenuhi dua aspek sekaligus. Pertama adalah tersedianya pangan yang cukup dan merata untuk seluruh penduduk. Kedua, setiap penduduk mempunyai akses fisik dan

ekonomi terhadap pangan untuk memenuhi kecukupan gizi guna menjalani kehidupan yang sehat dan produktif dari hari ke hari. Ketahanan pangan tingkat rumah tangga merupakan landasan bagi ketahanan pangan masyarakat, yang selanjutnya menjadi pilar bagi ketahanan pangan daerah dan nasional. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka salah satu prioritas utama pembangunan ketahanan pangan adalah memberdayakan masyarakat agar mampu menanggulangi masalah pangannya secara mandiri dan berkelanjutan.

Berdasarkan pada permasalahan riil yang dihadapi dan dengan memperhatikan strategi pembangunan nasional RPJM 2005-2009 ditetapkan 10 sasaran pembangunan ketahanan pangan ke depan. Sasaran terkait dengan aspek ketersediaan pangan adalah : (1) Dipertahankannya ketersediaan energi minimal 2200 kalori/kapita/hari dan protein 57 gram/kapita/hari; (2) Meningkatnya kemandirian pangan melalui pencapaian swasembada beras berkelanjutan, swasembada jagung tahun 2007, kedelai tahun 2015, swasembada gula pada tahun 2009 dan daging sapi tahun 2010; (3) Meningkatnya kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah dan masyarakat; (4) Meningkatnya rata-rata kepemilikan lahan melalui penyediaan lahan abadi beririgasi dan lahan kering masing-masing minimal seluas 15 juta hektar.

Terdapat satu sasaran yang terkait dengan aspek distribusi pangan yaitu meningkatnya jangkauan jaringan distribusi dan pemasaran ke seluruh daerah. Khususnya diberikan pada daerah marjinal dan terpencil untuk memfasilitasi kemudahan akses pasar input dan output pertanian. Sasaran terkait dengan aspek konsumsi dan kerawanan pangan adalah : (1) Meningkatnya konsumsi energi minimal 2000 Kalori/kapita/hari dan protein 52 gram/kapita/hari serta meningkatkan kualitas konsumsi pangan dan gizi dengan skor PPH minimal 80; (2) Terpenuhinya konsumsi pangan masyarakat yang aman, bermutu dan higienis; (c) Berkurangnya jumlah penduduk rawan pangan kronis (yang mengkonsumsi kurang dari 80 % Angka Kecukupan Energi/AKE) minimal 1 persen per tahun termasuk didalamnya ibu hamil yang mengalami anemia gizi dan anak balita dengan gizi kurang; dan (4) Meningkatnya kemampuan mengenali secara dini serta mengantisipasi dan menangani masalah kerawanan pangan dan gizi kronis.

Saudara- Saudara sekalian yang saya hormati

Strategi untuk mewujudkan ketahanan pangan yang akan dilaksanakan adalah strategi jalur ganda (*twin track strategy*) yaitu : (1) Membangun ekonomi berbasis pertanian dan pedesaan untuk menyediakan lapangan kerja dan pendapatan dan (2) Memenuhi pangan bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan melalui pemberian bantuan langsung serta pemberdayaan agar mereka semakin mampu mewujudkan ketahanan pangannya secara mandiri. Kedua strategi tersebut dijalankan dengan melibatkan seluruh komponen bangsa yaitu pemerintah, masyarakat termasuk LSM, organisasi profesi, organisasi massa, organisasi sosial, koperasi dan pelaku usaha.

Adapun kebijakan strategis ketahanan pangan nasional terkait dengan aspek ketersediaan pangan mencakup : (1) Menjamin ketersediaan pangan, (2) menata pertanahan dan tata ruang/wilayah dan (3) Pengembangan cadangan pangan. Implementasi kebijakan menjamin ketersediaan pangan dilakukan melalui kegiatan: (a) Pengembangan lahan abadi 15 juta ha beririgasi dan 15 juta ha lahan kering, (b) Pengembangan konservasi dan rehabilitasi lahan, (c) Pelestarian sumberdaya air dan pengelolaan daerah aliran sungai, (d) Pengembangan dan penyebaran benih, bibit unggul dan alsintan, (e) pengaturan pasokan gas untuk produksi pupuk, (f) Pengembangan skim permodalan yang kondusif, (g) Peningkatan produktivitas melalui perbaikan genetis dan teknologi budidaya, (h) Peningkatan efisiensi penanganan pasca panen dan pengolahan, (i) Penyediaan insentif investasi bidang pangan, serta (j) penguatan penyuluhan, kelembagaan tani dan kemitraan.

Penataan pertanahan dan tata ruang/wilayah dilakukan melalui : (a) Pengembangan reforma agraria, (b) Penyusunan tata ruang daerah dan wilayah, (c) Perbaikan administrasi pertanahan dan sertifikasi lahan, dan (d) Penerapan sistem perpajakan progresif bagi pelaku konversi lahan pertanian subur dan pembiaran lahan pertanian terlantar. Sementara itu, implementasi kebijakan pengembangan cadangan pangan dilakukan dengan pengembangan cadangan pangan pemerintah dan pengembangan lumbung pangan masyarakat.

Terkait dengan aspek distribusi pangan dengan cara mengembangkan sistem distribusi pangan yang efisien dan menjaga stabilitas harga pangan. Pengembangan sistem distribusi pangan yang efisien dilakukan melalui : (1) Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana distribusi, (2) Penghapusan retribusi produk pertanian dan perikanan, (3) Pemberian subsidi transportasi bagi daerah sangat rawan dan daerah terpencil, dan (4) Pengawasan sistem persaingan perdagangan yang tidak sehat. Sementara itu, untuk menjaga stabilitas harga pangan dilakukan dengan memantau harga pangan pokok secara berkala dan pengelolaan pasokan pangan/cadangan penyangga pangan.

Dalam aspek konsumsi pangan, kebijakan strategis diarahkan pada : (1) Meningkatkan aksesibilitas rumahtangga terhadap pangan, (2) Melaksanakan diversifikasi pangan, (3) Meningkatkan mutu dan keamanan pangan dan (4) Mencegah dan menangani keadaan rawan pangan dan gizi. Implementasi kebijakan peningkatan aksesibilitas rumahtangga terhadap pangan ditempuh melalui : (a) Pemberdayaan masyarakat miskin dan rawan pangan, (b) Peningkatan efektivitas program raskin dan (c) Penguatan lembaga pengelola pangan di pedesaan. Pelaksanaan diversifikasi konsumsi pangan dilakukan dengan : (a) Peningkatan diversifikasi konsumsi pangan dan gizi seimbang, (b) Pengembangan teknologi pangan, dan (c) Diversifikasi usahatani dan pengembangan pangan lokal.

Upaya peningkatan mutu dan keamanan pangan dilakukan dengan cara : (1) Pengembangan dan penerapan sistem mutu dan proses produksi, olahan dan perdagangan pangan, (2) Peningkatan kesadaran mutu dan keamanan pangan pada konsumen dan (3) Pencegahan dini dan penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan mutu dan keamanan pangan. Pencegahan dan penanganan keadaan rawan pangan dan gizi dilakukan dengan : (1) Pengembangan SKPG, (2) Peningkatan keluarga sadar gizi, (3) Pemanfaatan lahan pekarangan untuk peningkatan gizi keluarga dan (4) Pemanfaatan cadangan pangan pemerintah untuk penanggulangan keadaan rawan pangan dan gizi.

Saudara- Saudara sekalian yang saya hormati,

Demikian kinerja dan kebijakan strategis ketahanan pangan nasional yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah bersama *stakeholder* lainnya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh,

Menteri Pertanian,

ANTON APRIYANTONO